

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mutu pendidikan adalah hal yang selalu menjadi tujuan seluruh *stakeholder* pendidikan baik Pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai dengan lembaga pendidikan selalu berupaya agar pendidikan yang diselenggarakan bermutu. Untuk peningkatan mutu pendidikan salah satu upaya adalah melaksanakan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 91 menyatakan, ”setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan”.

Penjaminan mutu pendidikan atau yang biasa dikenal dengan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sistem ini terdiri dari dua komponen yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh semua komponen satuan pendidikan. Sedangkan SPME adalah sistem penjaminan mutu yang dijalankan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan akreditasi maupun badan standarisasi lainnya.

Penjaminan mutu pendidikan akan berjalan dengan baik apabila ada budaya mutu pada seluruh komponen satuan pendidikan dan memiliki tanggungjawab dalam

peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Arcaro (2007:809) bahwa, pencapaian mutu merupakan proses berkelanjutan dan terus-menerus yang dapat dicapai dengan hadirnya kesadaran bersama serta bekerjanya secara optimal para pelaku dalam program dan satuan pendidikan. Dengan demikian akan menciptakan proses pembelajaran yang baik, menyenangkan, optimal dan akan menghasilkan output serta outcom sesuai atau melampaui standar yang ditetapkan.

Fakta lapangan menunjukkan hasil pengembangan sekolah belum sesuai dengan yang diharapkan. Sebagian besar satuan pendidikan belum memenuhi SNP, bahkan masih ada satuan pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).(Dirjend Pendidikan Dasar Dan Menengah, 2017:3).Banyak permasalahan yang muncul terkait mutu pendidikan di Indonesia seperti lulusan yang kurang kompeten, kegiatan pembelajaran yang tidak sesuai dengan standar proses, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, tenaga pendidik yang kompetensi pedagogik dan profesionalnya rendah serta mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, tenaga kependidikan yang tidak menguasai administrasi dan manajemen, kepala sekolah yang tidak berfungsi maksimal sebagai manajer dan pemimpin pembelajaran, kurangnya peran serta masyarakat baik orang tua peserta didik, dunia usaha dan industri dalam pembiayaan pendidikan karena masih rendahnya kepedulian terhadap bidang pendidikan atau karena sekolah sendiri belum secara maksimal menggali potensi sumberdaya finansial dari masyarakat, dan masih banyak hal lainnya lagi. Hal ini dikarenakan masih banyak sekolah yang belum

maksimal bahkan belum sama sekali melakukan upaya untuk penjaminan mutu pendidikan.

Hal ini ditunjukkan oleh capaian SNP pada sekolah masih perlu mendapat perhatian serius dari pemangku kepentingan pendidikan. Kolaborasi pemangku kepentingan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan sangat dibutuhkan untuk membenahi kualitas pendidikan. Hasil ini menunjukkan bahwa harapan mewujudkan sekolah memenuhi standar nasional pendidikan melalui pengembangan sekolah model SPMI khususnya jenjang SMA belum mencapai tujuan yang diharapkan.

Oleh sebab itu penjaminan mutu (*quality assurance*) harus dilakukan sejak awal proses pendidikan dengan menerapkan sistem manajemen mutu untuk menjamin terwujudnya kualitas dalam setiap tahapan kegiatan sekolah, yaitu: input, proses, dan output pengelolaan sekolah. Dengan demikian apabila terjadi kesalahan dalam input dan proses pengelolaan pendidikan, maka harus segera dilakukan perbaikan sehingga proses dan hasil pendidikan menjadi lebih optimal.

Jika proses pendidikan tidak dilakukan secara optimal dalam memenuhi standar, maka kompetensi lulusan juga tidak akan dijamin mutunya. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu evaluasi menyeluruh terhadap program pengembangan sekolah dalam rangka memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan program tersebut.

Evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan informasi untuk menetapkan apakah tujuan pelaksanaan kegiatan telah tercapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Guba dan Lincoln (Hamid Hasan, 1988) dalam Sanjaya (2011:241)

mendefinisikan bahwa, evaluasi sebagai suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan. Selanjutnya Ralph Tyler dalam Arikunto (2007: 19) menyatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan tingkat ketercapaian tujuan pendidikan, hambatan dan cara tujuan dicapai. Informasi atau data yang diperoleh dari hasil evaluasi menentukan sejauh mana tujuan sudah tercapai, dalam hal apa sudah tercapai dan bagaimana bagian tersebut tercapai. Hasil evaluasi memberikan informasi tentang bagian yang mana dari tujuan belum tercapai dan mengapa tidak tercapai.

Berdasarkan pada keseluruhan tinjauan di atas, dapat disimpulkan bahwa, evaluasi pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan. Kegiatan evaluasi merupakan bagian dari sebuah sistem yang saling berhubungan antara bagian yang satu dengan lainnya. Evaluasi merupakan kegiatan subsistem pendidikan yang terencana secara sistematis. Evaluasi bertujuan untuk memperoleh informasi pelaksanaan kegiatan pendidikan. Informasi yang diperoleh berguna sebagai faktor prediktor dan sekaligus sebagai penentu ketercapaian tujuan, hambatan, efek samping, dan pengambilan keputusan mengenai sebuah program pendidikan yang dilaksanakan secara berulang. Sebagai sebuah program yang dilaksanakan secara berulang, maka obyek dari evaluasi tersebut merupakan suatu sistem yang tak terpisahkan antara input, proses dan outputnya.

Salah satu sekolah yang sudah melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dengan mengimplementasikan SPMI adalah SMA Negeri 3 Kota Gorontalo. SMA Negeri 3 Kota Gorontalo secara resmi melaksanakan SPMI sejak tahun pelajaran

2017-2018 setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dan sampai sekarang meskipun pada dasarnya manajemen sekolah berbasis mutu telah dilaksanakan. Manajemen berbasis mutu dilaksanakan mulai dari seleksi ketat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan. SMA Negeri 3 Kota Gorontalo juga sangat proaktif terhadap isu-isu pendidikan terutama yang berhubungan dengan perbaikan mutu pendidikan, hal ini dibuktikan dengan pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) oleh kepala sekolah.

Hasil observasi di SMA Negeri 3 Kota Gorontalo menunjukkan pengelolaan mutu telah dilaksanakan dengan baik, terutama dalam pengelolaan sekolah (manajerial), sedangkan untuk bidang akademik seperti kemampuan meliputi: cara membuat perencanaan pembelajaran dalam peningkatan mutu pendidikan, implementasi proses pembelajaran, penilaian hasil belajar dan cara melakukan evaluasi pengelolaan sekolah menjadi daya tarik peneliti untuk menelitinya.

Berdasarkan data dan fakta di atas penulis tertarik mengambil judul: “Evaluasi Implementasi Sistem Penjaminan mutu Internal Akademik Di SMA Negeri 3 Kota Gorontalo.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang sebagaimana di uraikan di atas, mengingat luas dan kompleksnya permasalahan yang ada, dan kemampuan peneliti yang terbatas maka dalam penelitian ini di batasi ruang lingkup masalah yang akan di teliti pada aspek-

aspek yang berkaitan tentang evaluasi pelaksanaan penjamin mutu internal akademik di SMA Negeri 3 Kota Gorontalo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang di paparkan diatas dapat ditarik suatu rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penjaminan mutu internal akademik di SMA Negeri 3 Kota Gorontalo di tinjau dari *context* ?
2. Bagaimana implementasi penjaminan mutu internal akademik di SMA Negeri 3 Kota Gorontalo di tinjau dari *input* ?
3. Bagaimana implementasi penjaminan mutu internal akademik di SMA Negeri 3 Kota Gorontalo di tinjau dari *process* ?
4. Bagaimana implementasi penjaminan mutu internal akademik di SMA Negeri 3 Kota Gorontalo di tinjau dari *product* ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empirik tentang sistem penjaminan mutu internal akademik di SMA Negeri 3 Kota Gorontalo. Sejalan dengan tujuan tersebut secara khusus penelitian bermaksud untuk mengetahui, antara lain:

1. Untuk mengetahui hasil evaluasi implementasi penjaminan mutu internal akademik di SMA Negeri 3 kota Gorontalo di tinjau dari *context*.
2. Untuk mengetahui hasil evaluasi implementasi penjaminan mutu internal akademik di SMA Negeri 3 kota Gorontalo di tinjau dari *input*.

3. Untuk mengetahui hasil evaluasi implementasi penjaminan mutu internal akademik di SMA Negeri 3 kota Gorontalo di tinjau dari *process*.
4. Untuk mengetahui hasil evaluasi implementasi penjaminan mutu internal akademik di SMA Negeri 3 kota Gorontalo di tinjau dari *product*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan teori tentang evaluasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal akademik (SPMI) dan implementasinya pada satuan pendidikan menengah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Disamping itu juga dapat menjadikannya yang bermanfaat untuk perkembangan teori manajemen mutu dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat positif bagi:

- a. Penulis; penelitian ini dapat menambah wawasan penulis tentang SPMI secara optimal sekaligus menjadi tugas akhir akademik untuk memperoleh gelar Magister pada Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo Program Studi Manajemen pendidikan.
- b. Pengelola lembaga pendidikan; hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan *best practice* untuk kemudian ditiru, diadaptasi, dimodifikasi kemudian dikembangkan oleh pengelola lembaga pendidikan sebagai pemegang kebijakan berkaitan dengan SPMI untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan.

